

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Pendidikan politik merupakan satu diantara elemen pendidikan yang penting bagi warga negara. Pendidikan politik dapat berlangsung pada pendidikan nonformal seperti organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI. Penyelenggaraan pendidikan politik dalam organisasi ini meliputi diskusi, kajian isu-isu sosial, dan pembiasaan berpartisipasi terhadap organisasi, seperti dalam kegiatan musyawarah anggota organisasi. Pendidikan politik ini sangat ditunjang oleh pola pengkaderan yang dilakukan organisasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Adapun pendidikan politik ini hanya ditujukan kepada kader-kader organisasi yang masih aktif dan mahasiswa UPI secara umum, maka tidak ada program pendidikan politik yang diselenggarakan oleh organisasi bagi para alumni. Dalam hal ini, alumni lebih cenderung pada aplikasi dari pendidikan politik yang didapatkan dari organisasi. Dalam penyelenggaraannya, pendidikan politik ini sering dihadapkan pada hambatan-hambatan seperti kesibukan kader dengan kegiatan akademik, keterbatasan dana organisasi, dan kurangnya dukungan lembaga terhadap kegiatan organisasi ekstrakampus ini. Namun, agar pendidikan politik ini dapat terselenggara perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan sebagai solusi atas hambatan tersebut, seperti di antaranya penentuan jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan kegiatan akademik kader, berwirausaha dalam

pemenuhan kebutuhan dana organisasi, dan memperbaiki hubungan dengan pihak lembaga. Dari kesimpulan tersebut dapat ditarik sebuah inti sari bahwa organisasi kemahasiswaan ekstrakampus seperti HMI, KAMMI, dan GMNI dapat dikatakan sebagai sebuah miniatur dari suatu negara, maka organisasi tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran politik mahasiswa sehingga mampu menjadi pelaku politik dan partisipan yang bertanggung jawab terhadap negaranya.

2. Kesimpulan Khusus

- a. Program-program yang dilakukan organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI dalam menyelenggarakan pendidikan politik ini meliputi kegiatan-kegiatan pembiasaan seperti musyawarah anggota organisasi dan partisipasi kader dalam semua kegiatan organisasi. Program berikutnya yang dilakukan adalah melalui diskusi, kajian, dan seminar yang dilakukan untuk menganalisis isu-isu sosial dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut yang kemudian menyikapinya dengan bentuk aksi.
- b. Kurikulum atau pola pengaderan yang dilakukan HMI meliputi LK1, LK2, dan LK3 dengan program TRK sebagai tindak lanjut pengaderan tersebut. Adapun pengaderan yang dilakukan KAMMI meliputi DM1, DM2, dan DM3 yang ditindaklanjuti dengan program MK. Sedangkan pengaderan yang dilakukan GMNI meliputi PPAB, KTD, KTM, dan KTP. Pola pengaderan tersebut sifatnya berkelanjutan dan berkesinambungan selama kader aktif dalam organisasi.

- c. Penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan HMI, KAMMI, dan GMNI komisariat UPI tidak ditujukan kepada para alumni namun hanya sebatas keterkaitan antara alumni dengan komisariat dalam bentuk koordinasi, undangan dan pemateri.
- d. Hambatan-hambatan yang dihadapi organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI dalam penyelenggaraan pendidikan politik terletak pada keterbatasan waktu dan kesibukan kader, pendanaan kegiatan organisasi dan dukungan pihak lembaga.
- e. Solusi yang diambil organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI komisariat UPI sebagai langkah untuk meminimalisir hambatan tersebut meliputi pemberian pemahaman pada kader untuk berpartisipasi dalam organisasi, penentuan jadwal penyelenggaraan pendidikan politik yang disesuaikan dengan jadwal akademik kader, wirausaha untuk mendapatkan kebutuhan dana dan memperbaiki hubungan organisasi dengan pihak lembaga.

B. Saran

1. Bagi Organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI

Organisasi kemahasiswaan khususnya ekstrakampus merupakan wahana yang tepat untuk menciptakan mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki tingkat partisipasi yang lebih terhadap negaranya. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan atas semua kekurangan dalam penyelenggaraan pendidikan politik untuk menciptakan warga negara yang melek politik sehingga mampu berbuat lebih baik lagi bagi negara Indonesia ini.

2. Bagi Kader Organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI

Kader organisasi merupakan segelintir mahasiswa yang memiliki kesempatan lebih dibandingkan mahasiswa secara umum perlu meningkatkan kembali keaktifannya dalam berorganisasi, khususnya dalam pemahaman tentang pendidikan politik agar melanjutkan keberlangsungan hidup organisasi dan mampu membawa mahasiswa lain dan masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik sehingga dapat tercapainya tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang makmur dan sejahtera.

3. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan lebih memahami secara mendalam tentang pendidikan politik. Hal ini dikarenakan pentingnya pendidikan politik bagi kehidupan masyarakat dan negara. Terlebih peneliti yang juga terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan politik di organisasi dapat dijadikan bekal untuk menciptakan perubahan yang lebih baik pada masyarakat dan negara.

4. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa sebagai agen perubahan sangat memerlukan bekal yang lebih agar mampu berperan dalam perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Bukan hanya kebutuhan dalam bidang akademik, namun kebutuhan keterampilan dalam berorganisasi akan sangat menunjang kebutuhan akademik dan diperlukan dalam masyarakat. Kehidupan dalam suatu organisasi merupakan bentuk kecil komunikasi dan interaksi dalam masyarakat. Pembiasaan dalam berorganisasi merupakan bekal yang sangat berharga sebelum terjun di kehidupan masyarakat. Terlebih Indonesia negara yang populasi penduduk yang banyak dan beraneka

ragam sehingga sering dirundung masalah konflik antar golongan. Hal tersebut yang melatarbelakangi perlunya pembelajaran komunikasi dan interaksi dalam organisasi, sehingga selain mahasiswa terampil dalam berinteraksi dan komunikasi dalam masyarakat juga mampu memberikan *problem solving* atas konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Masalah berikutnya terletak pada tingkat partisipasi warga negara terhadap negaranya yang dirasa kurang. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, sangat diperlukan partisipasi warga negara terhadap negaranya untuk mencapai kebaikan negaranya. Oleh karena itu, kedua masalah tersebut dapat diatasi dengan kesiapan mahasiswa sebagai agen perubahan ke arah yang lebih baik. Langkah pembelajaran awal untuk bekal tersebut selain dalam bidang akademik, maka perlunya organisasi kemahasiswaan terlebih ekstrakampus sebagai wahana pembelajaran interaksi dan komunikasi serta pembelajaran berpartisipasi dalam sistem demokrasi.

5. Bagi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan

Mahasiswa jurusan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kalangan yang dianggap memiliki pengetahuan politik lebih dari mahasiswa lainnya sangat memerlukan pemahaman tentang pendidikan politik. Oleh karena itu, mahasiswa jurusan Pendidikan Kewarganegaraan ini harus lebih menelaah dan mendalami pendidikan politik tersebut, baik dalam bidang akademik maupun dalam organisasi sehingga dapat menjadikan mahasiswa lulusan Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan ini sebagai pionir ke arah perubahan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Bagi Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pemilik otoritas tertinggi terhadap mahasiswa jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan sebagai laboratorium demokrasi sudah seharusnya mendukung dan mengarahkan mahasiswa jurusan Pendidikan Kewarganegaraan untuk belajar berorganisasi sebagai sarana pendidikan politik mahasiswa, baik organisasi kemahasiswaan intra terlebih organisasi kemahasiswaan ekstrakampus. Hal tersebut bukan hanya mendukung bidang akademik mahasiswa jurusan PKn namun yang paling sebagai bekal dalam hidup bermasyarakat baik sebagai lulusan Pendidikan Kewarganegaraan yang berkualitas sebagai guru PKn dan juga sebagai warga negara yang peduli terhadap negaranya (*to be good citizenship*).

7. Bagi Universitas

Kegiatan organisasi kemahasiswaan intra maupun ekstrakampus merupakan wahana untuk menciptakan mahasiswa yang berkualitas selain dalam bidang akademik. Terlebih organisasi kemahasiswaan ekstrakampus yang secara hukum tidak memiliki legalitas di kampus, maka pihak universitas perlu mendukung secara moril segala aktifitas organisasi tersebut terlebih dalam penyelenggaraan pendidikan politik yang tidak lain bertujuan untuk mencerdaskan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia sehingga lulusan UPI ini dapat berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.